



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 7974-7982

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Praktik Kepemimpinan dan Integritas dalam Pengambilan Keputusan Publik di Desa Tulang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun

Azmi, Roli Sambuardi, Muhammad Taufiq Razali, Deska Zulkarnain

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Karimun

alazzamazmi@gmail.com, rolis4ambuardi@gmail.com, taufiqrazali09@gmail.com, deskaditha@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kepemimpinan dan integritas dalam pengambilan keputusan publik di Desa Tulang, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun. Latar belakang penelitian ini didorong oleh pentingnya peran kepemimpinan desa dalam menentukan arah kebijakan publik serta menjaga integritas dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan kepada masyarakat. Pengambilan keputusan di tingkat desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika, transparansi, dan akuntabilitas yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memahami bagaimana praktik kepemimpinan dan integritas diwujudkan dalam proses pengambilan keputusan publik di Desa Tulang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Partisipan dipilih secara purposif berdasarkan peran, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan aparat desa dan tokoh masyarakat, observasi terhadap proses pemerintahan desa, serta analisis dokumen terkait kebijakan dan administrasi desa. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola praktik kepemimpinan dan integritas dalam pengambilan keputusan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kepemimpinan di Desa Tulang cenderung bersifat partisipatif, ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, komunikasi yang relatif terbuka, serta upaya pemimpin desa dalam merespons aspirasi warga. Namun demikian, masih ditemukan tantangan berupa lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan dan penanganan konflik yang belum optimal. Sementara itu, integritas dalam pengambilan keputusan tercermin melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan etika, meskipun terdapat beberapa potensi permasalahan yang memerlukan perhatian dan penguatan lebih lanjut.

Kata kunci: Kepemimpinan, Integritas, Pengambilan Keputusan Publik

1. Latar Belakang

Pentingnya kepemimpinan yang efektif dan integritas dalam pengambilan keputusan publik di desa tidak hanya menciptakan tata kelola yang baik, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Desa Tulang, seperti banyak desa lainnya, menghadapi tantangan kompleks dalam hal pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan sumber daya, dan penyediaan pelayanan dasar. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang bagaimana praktik kepemimpinan dan integritas tercermin dalam pengambilan keputusan di desa ini menjadi sangat penting (Sobari, 2019).

Desa Tulang, yang terletak di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, menjadi perhatian utama penelitian ini karena perannya yang strategis dalam menyelenggarakan pemerintahan lokal dan pelayanan publik. Dalam perkembangan pemerintahan di Indonesia, desa memiliki peran yang semakin penting sebagai unit terdepan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Desa Tulang, dengan karakteristiknya yang unik, menjadi objek penelitian yang menarik untuk dipahami lebih lanjut mengenai praktik kepemimpinan dan integritas dalam pengambilan keputusan publik. (Duryat, 2022)

Seiring dengan perubahan regulasi dan struktur pemerintahan di Indonesia, desa menjadi unit otonom yang memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya lokal. Desa Tulang, sebagai bagian dari gambaran lebih besar pemerintahan desa di Indonesia, menjadi cermin keberhasilan

dan tantangan dalam mewujudkan prinsip tata kelola yang baik, kepemimpinan yang efektif, dan integritas dalam pengambilan keputusan.

Kepemimpinan di tingkat desa memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa. Kepala desa sebagai pemimpin lokal tidak hanya bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi desa, tetapi juga memimpin proses pengambilan keputusan publik yang bersifat partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks pemerintahan desa modern, praktik kepemimpinan harus mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan demi terciptanya pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa komunikatif dan partisipatifnya gaya kepemimpinan kepala desa turut mempercepat pelayanan publik dan menyerap aspirasi masyarakat secara efektif (Arnia & Munawir, 2025).

Praktik kepemimpinan yang baik di tingkat desa menjadi elemen penting dalam mencapai tujuan pembangunan lokal. Kepemimpinan yang efektif memastikan pelayanan publik yang berkualitas, partisipasi masyarakat yang aktif, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Di samping itu, integritas dalam pengambilan keputusan adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan desa (Sagala & Sos, 2018). Selain itu, integritas—yang mencakup kejujuran, konsistensi antara ucapan dan tindakan, serta komitmen terhadap kepentingan publik—merupakan landasan moral penting dalam pengambilan keputusan etis di sektor pemerintahan desa. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya integritas moral dalam konteks pengambilan keputusan dapat berdampak pada lemahnya pelaksanaan musyawarah desa dan rendahnya kualitas kebijakan publik yang dihasilkan. (Syahril & Harianti, 2025) Integritas public leader juga menjadi faktor fundamental dalam membentuk budaya pelayanan publik yang berkualitas, dengan fokus pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.

Desa Tulang, seperti banyak desa di Indonesia, dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang. Tantangan melibatkan keterbatasan sumber daya, kompleksitas tata kelola, dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Di tengah tantangan tersebut, Desa Tulang juga memiliki potensi dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan dan praktik pemerintahan yang efektif. Di Desa Tulang, kepemimpinan di tingkat desa juga dihadapkan pada tantangan rumit: bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai integritas dengan proses pengambilan keputusan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Studi empiris pada tingkat desa lain di Indonesia menunjukkan variasi gaya kepemimpinan—mulai dari demokratis sampai partisipatif—yang mempengaruhi kualitas keputusan dan keterlibatan warga dalam pemerintahan desa. Hal ini memperkuat urgensi untuk menganalisis lebih dalam praktik kepemimpinan yang efektif serta integritas dalam konteks pengambilan keputusan publik di Desa Tulang.

Selanjutnya, integrasi kedua aspek tersebut tidak hanya penting untuk meningkatkan efektifitas pelayanan publik, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Beberapa studi menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya desa berkaitan erat dengan kualitas kepemimpinan serta prinsip integritas, yang keduanya berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pengambilan keputusan publik di tingkat lokal.

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada aspek kepemimpinan dan integritas dalam pengambilan keputusan publik di Desa Tulang, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun. Fokus tersebut diarahkan untuk mengkaji bagaimana peran kepala desa dan perangkat desa dalam menerapkan nilai-nilai kepemimpinan yang partisipatif serta menjaga integritas dalam setiap proses pengambilan keputusan. Kepemimpinan dan integritas dipandang sebagai dua elemen kunci yang saling berkaitan dalam menentukan kualitas kebijakan publik di tingkat desa (Sos, 2020).

Analisis mendalam dilakukan untuk memahami bagaimana praktik kepemimpinan dan integritas tersebut tercermin dalam perumusan kebijakan desa, pelaksanaan program pembangunan, serta pola interaksi antar pemangku kepentingan di tingkat desa, termasuk pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat. Melalui kajian ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap sejauh mana proses pengambilan keputusan publik dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika kepemimpinan dan integritas dalam tata kelola pemerintahan Desa Tulang.

Pentingnya kepemimpinan dan integritas dalam konteks desa menciptakan urgensi untuk menjalankan penelitian ini. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika pemerintahan desa di Desa Tulang dan sekaligus memberikan sumbangan pada literatur mengenai tata kelola pemerintahan lokal di Indonesia. Melalui pemahaman mendalam terhadap kondisi Desa Tulang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif untuk pengembangan kebijakan, perbaikan praktik pemerintahan, dan penguatan kapasitas di tingkat desa, serta memberikan inspirasi bagi desa-desa lain yang menghadapi konteks serupa.

Dalam dinamika pemerintahan lokal, desa memiliki peran yang sangat strategis sebagai unit pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Desa menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan sumber daya lokal, serta pelaksanaan berbagai kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warga. Oleh karena itu, kualitas tata kelola pemerintahan desa sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Desa Tulang, yang terletak di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dipilih sebagai fokus penelitian ini untuk menggali secara lebih mendalam praktik kepemimpinan dan integritas dalam pengambilan keputusan publik. Pemilihan Desa Tulang didasarkan pada perannya dalam mengelola kebijakan dan program desa yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta dinamika sosial masyarakat yang beragam. Kondisi tersebut menjadikan Desa Tulang sebagai konteks yang relevan untuk mengkaji bagaimana kepemimpinan desa dijalankan dan bagaimana nilai-nilai integritas diterapkan dalam proses pengambilan keputusan publik.

Sebagai bagian integral dari tatanan pemerintahan, desa memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Satria dan Mony (2019) menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan desa dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan serta integritas aparatur desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran strategis desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendokumentasikan praktik kepemimpinan serta integritas dalam konteks pengambilan keputusan publik di Desa Tulang, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun. Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana peran kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan fungsi kepemimpinan, menerapkan nilai-nilai integritas, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai dinamika kepemimpinan desa dan proses pengambilan keputusan publik yang berlangsung di tingkat lokal.

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Desa Tulang menjalankan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Pemahaman ini mencakup mekanisme pengambilan keputusan, pola interaksi antar pemangku kepentingan, serta penerapan prinsip akuntabilitas dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi praktik-praktik baik sekaligus tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lokal, temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan kebijakan, pengembangan program pelatihan, serta penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Sementara itu, bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai kepemimpinan dan integritas di tingkat desa serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan tata kelola pemerintahan desa.

2. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini dirancang untuk memberikan pendekatan yang sistematis dan komprehensif dalam menganalisis praktik kepemimpinan dan integritas dalam pengambilan keputusan publik di Desa Tulang, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun. Pemilihan metodologi ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika kepemimpinan desa, nilai-nilai integritas, serta interaksi antaraktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik di tingkat desa. Pendekatan kualitatif

dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian secara kontekstual dan mendalam.

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus sebagai kerangka kerja analisis. Desain studi kasus dipilih karena mampu mengkaji fenomena sosial yang kompleks dan spesifik dalam suatu konteks tertentu secara mendalam. Melalui studi kasus, peneliti dapat memahami secara utuh praktik kepemimpinan dan integritas dalam pengambilan keputusan publik yang berlangsung di Desa Tulang dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan kelembagaan setempat (Tersiana, 2018).

Instrumen utama dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam dilakukan terhadap kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengalaman mereka dalam proses pengambilan keputusan publik. Observasi partisipatif digunakan untuk mengamati secara langsung dinamika interaksi, pola komunikasi, serta proses musyawarah dalam pengambilan keputusan di Desa Tulang. Sementara itu, analisis dokumen dilakukan terhadap peraturan desa, notulen rapat, laporan kegiatan, dan dokumen lain yang relevan guna memperkuat dan melengkapi data lapangan (Ramdhan, 2021).

Data kualitatif yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Proses analisis meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan mengidentifikasi pola dan tema utama yang berkaitan dengan praktik kepemimpinan dan integritas. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Praktik Kepemimpinan di Desa Tulang

Dalam konteks pemerintahan desa, praktik kepemimpinan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target administratif semata, tetapi juga diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat serta penguatan nilai-nilai demokrasi lokal. Kepala desa dituntut untuk mampu berperan sebagai fasilitator yang membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan desa. Praktik kepemimpinan yang partisipatif dan inklusif memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga. Menurut Dwiyanto (2021), kepemimpinan yang mendorong partisipasi publik secara luas akan meningkatkan kualitas keputusan, memperkuat akuntabilitas, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Pemerintahan desa di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan sumber daya desa, serta pengambilan keputusan yang secara langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Desa menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan publik karena berhadapan langsung dengan warga dan permasalahan sosial yang bersifat kontekstual. Meutia (2017) menegaskan bahwa efektivitas pemerintahan desa sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala desa dalam mengelola kewenangan, sumber daya, dan partisipasi masyarakat secara seimbang. Oleh karena itu, praktik kepemimpinan desa yang demokratis, transparan, dan berintegritas menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik serta pembangunan desa yang berkelanjutan.

a. Struktur Pemerintahan Desa:

Dalam tatanan pemerintahan desa, kepala desa bersama dengan perangkat desa lainnya memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola administrasi, pelayanan masyarakat, dan implementasi kebijakan. Struktur pemerintahan desa di Desa Tulang menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan yang mendukung pembangunan di tingkat lokal.

b. Peran Kepemimpinan dalam Pengambilan Keputusan:

Kepemimpinan di Desa Tulang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup peran strategis dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan publik di desa ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga.

- c. **Pemantapan Demokrasi Lokal:**
Praktik kepemimpinan di Desa Tulang mencerminkan upaya pemantapan demokrasi lokal. Melalui mekanisme musyawarah desa dan partisipasi masyarakat, pemimpin desa berupaya membangun kebijakan yang responsif terhadap beragam kebutuhan dan harapan warga.
- d. **Tantangan dalam Koordinasi Antarstakeholder:**
Meskipun upaya yang dilakukan, terdapat tantangan dalam koordinasi antarstakeholder. Dalam konteks ini, koordinasi antar perangkat desa, pihak swasta, dan lembaga non-pemerintah perlu diperkuat agar pelaksanaan kebijakan berjalan lebih efektif.
- e. **Penguatan Peran Perempuan dan Masyarakat Adat:**
Penting untuk menyoroti penguatan peran perempuan dan masyarakat adat dalam praktik kepemimpinan. Pemahaman akan keberagaman sosial dan keadilan gender menjadi landasan untuk kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.
- f. **Harmonisasi antara Tradisi dan Inovasi:**
Desa Tulang memiliki warisan tradisional yang kaya. Kepemimpinan di desa ini perlu memadukan nilai-nilai tradisional dengan inovasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- g. **Aspek Keuangan dan Pembangunan Infrastruktur:**
Praktik kepemimpinan juga mencakup manajemen keuangan desa dan pembangunan infrastruktur. Pemanfaatan dana desa dan implementasi proyek infrastruktur menjadi faktor penentu keberhasilan kepemimpinan dalam mencapai tujuan pembangunan.

3.1.2. Integritas dalam Pengambilan Keputusan di Desa Tulang

Integritas dalam pengambilan keputusan desa berkaitan erat dengan kemampuan pemimpin desa dalam menjaga nilai kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas pada setiap tahapan proses pemerintahan desa. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam pelaksanaan musyawarah desa yang terbuka, pengelolaan anggaran desa yang transparan, serta pelaksanaan program pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pemimpin desa yang memiliki integritas tinggi akan berupaya memastikan bahwa setiap keputusan publik diambil berdasarkan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini sejalan dengan pandangan Dwiyanto (2021) yang menyatakan bahwa kepemimpinan yang berintegritas cenderung menghasilkan keputusan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta mendukung keberlanjutan pembangunan desa.

Lebih lanjut, integritas menjadi unsur kunci dalam memastikan bahwa setiap keputusan publik di tingkat desa diambil dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, transparansi, dan pertanggungjawaban. Keputusan yang dihasilkan melalui proses yang berintegritas tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan desa, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Menurut Sawir dan Sos (2021), integritas aparatur pemerintah desa merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa. Dengan demikian, integritas dalam pengambilan keputusan desa tidak hanya berfungsi sebagai nilai etis, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menciptakan pemerintahan desa yang efektif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

- a. **Fondasi Etika dan Nilai-Nilai Budaya:**
Integritas dalam pengambilan keputusan di Desa Tulang mempunyai dasar pada etika dan nilai-nilai budaya lokal. Etika dalam berpemerintahan diintegrasikan dengan nilai-nilai tradisional yang dipegang teguh oleh masyarakat desa.
- b. **Transparansi dan Publikasi Kebijakan:**
Penerapan integritas tercermin melalui transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Desa Tulang memiliki mekanisme untuk mempublikasikan kebijakan dan keputusan publik secara terbuka agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah.

c. Pertanggungjawaban dan Akuntabilitas:

Integritas mencakup pertanggungjawaban yang tinggi dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Setiap tindakan dan kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas.

d. Pengelolaan Keuangan yang Transparan:

Integritas juga tercermin dalam pengelolaan keuangan desa. Desa Tulang berkomitmen untuk menjalankan praktik pengelolaan keuangan yang transparan, termasuk pemanfaatan dana desa dengan akuntabilitas yang baik.

e. Penguatan Peran Perempuan dan Masyarakat Adat:

Integritas di Desa Tulang juga menggarisbawahi penguatan peran perempuan dan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat adat dan perempuan memiliki peran aktif dalam mengawasi agar kebijakan yang dihasilkan mencerminkan keadilan dan keberlanjutan.

f. Pengembangan Sistem Pengaduan Masyarakat:

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan integritas, Desa Tulang mungkin telah mengembangkan sistem pengaduan masyarakat. Ini memungkinkan warga untuk melaporkan praktik-praktik yang dianggap melanggar etika dan integritas.

g. Harmonisasi dengan Standar Kebijakan Nasional:

Praktik integritas di Desa Tulang seharusnya juga selaras dengan standar kebijakan nasional terkait transparansi, pertanggungjawaban, dan partisipasi masyarakat. Ini mendukung pembentukan kebijakan yang konsisten dan kompatibel dengan regulasi yang berlaku.

3.2. Diskusi

3.2.1. Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat

Kepemimpinan merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk memengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan individu maupun kelompok guna mencapai tujuan bersama secara efektif. Dalam konteks pemerintahan publik, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kewenangan formal, tetapi juga dengan kemampuan membangun kepercayaan, komunikasi, serta keteladanan dalam menjalankan tugas pemerintahan (Thoha, 2019). Keterlibatan aktif masyarakat di Desa Tulang merupakan indikator positif dari praktik kepemimpinan yang inklusif. Namun, perlu adanya langkah-langkah untuk meningkatkan koordinasi antarstakeholder guna mengoptimalkan potensi partisipasi ini. Desa Tulang, sebagai entitas pemerintahan terkecil di Kecamatan Karimun, memiliki struktur kepemimpinan yang menjunjung tinggi nilai-nilai lokal dan kearifan budaya. Kepemimpinan di desa ini memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan membimbing masyarakat menuju pembangunan yang berkelanjutan. (Kardina & Frinaldi, 2023)

Praktik kepemimpinan di Desa Tulang dicirikan oleh pendekatan partisipatif, di mana kepala desa dan perangkat desa aktif melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Mekanisme musyawarah desa dan dialog terbuka menjadi sarana utama untuk mendukung partisipasi masyarakat. Kepemimpinan di Desa Tulang tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga berkaitan dengan pengembangan dan implementasi program pembangunan lokal. Kepemimpinan diarahkan untuk memastikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Praktik kepemimpinan di desa ini mencakup upaya pemberdayaan masyarakat. Ini tercermin dalam kebijakan dan program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan keterlibatan aktif warga dalam menentukan arah pembangunan desa. Kepemimpinan di Desa Tulang memiliki tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan. Pemeliharaan sumber daya alam dan implementasi praktik berkelanjutan menjadi bagian integral dari kepemimpinan yang bertanggung jawab terhadap generasi mendatang. (Hajar et al., 2022)

Meskipun adanya kepemimpinan partisipatif, terdapat tantangan dalam koordinasi antarstakeholder. Koordinasi antara perangkat desa, lembaga pemerintah, dan pihak swasta perlu terus diperkuat agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Kepemimpinan di Desa Tulang menunjukkan inovasi dalam pengelolaan keuangan desa. Pemanfaatan dana desa untuk proyek-proyek strategis dan kesejahteraan masyarakat menjadi bagian penting dari visi kepemimpinan lokal.

Desa Tulang memberikan perhatian khusus terhadap peran perempuan dalam kepemimpinan. Mendorong partisipasi aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan pemberdayaan ekonomi menjadi fokus untuk mencapai inklusivitas gender. Desa Tulang mungkin memiliki mekanisme evaluasi kinerja kepemimpinan untuk memastikan akuntabilitas dan peningkatan berkelanjutan. Ini mencakup evaluasi dari masyarakat, pemantauan hasil program, dan revisi kebijakan berdasarkan evaluasi kinerja. (Irawan, 2017).

3.2.2. Tantangan dalam Penanganan Konflik

Penanganan konflik di tingkat desa merupakan tantangan yang tidak terpisahkan dari dinamika sosial masyarakat lokal. Konflik desa umumnya dipicu oleh perbedaan kepentingan dalam pengelolaan sumber daya desa, pembagian bantuan sosial, penentuan prioritas pembangunan, serta proses pengambilan keputusan yang dinilai kurang transparan. Menurut Sutiyo dan Maharjan (2021), konflik di desa sering kali muncul akibat ketidakseimbangan relasi kekuasaan dan lemahnya mekanisme partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa.

Tantangan dalam penanganan konflik menyoroti perlunya pengembangan strategi yang lebih efektif untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di Desa Tulang. Pelibatan mediator eksternal atau program pelatihan konflik dapat menjadi opsi yang layak. Desa Tulang, sebagai entitas yang dihuni oleh masyarakat yang beragam, dihadapkan pada tantangan mengelola dan merespons perbedaan budaya, suku, dan pandangan. Keragaman ini dapat menjadi pemicu konflik jika tidak ditangani dengan bijaksana. (Yunina & Pujiyanto, 2024).

Ketidaksepakatan atau perbedaan pendapat terkait kebijakan dan program pembangunan desa dapat menjadi sumber konflik. Proses konsultasi dan komunikasi yang kurang efektif dapat memperburuk situasi. Konflik yang berhubungan dengan masalah tanah dan pemilikan lahan seringkali menjadi permasalahan yang kompleks di Desa Tulang. Penanganan yang tidak tepat dapat merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakharmonisan.

Adanya kesenjangan sosial dan ekonomi antarwarga dapat memicu ketegangan dan konflik. Kebijakan yang tidak merata dalam pembangunan sosial dan ekonomi dapat meningkatkan perasaan ketidakpuasan dan tidak adil. Tantangan mendasar mungkin terkait dengan kurangnya mekanisme penyelesaian konflik yang efektif di tingkat desa. Kurangnya akses terhadap alternatif penyelesaian sengketa dapat memperumit penanganan konflik.

Sebagian masyarakat mungkin tidak menyadari potensi konflik, dan kurangnya pendekatan pencegahan dapat menyebabkan situasi yang merugikan. Kesadaran akan pentingnya dialog dan partisipasi dalam mencegah konflik perlu ditingkatkan. Faktor eksternal, seperti pengaruh dari luar desa, bisa menjadi pemicu konflik. Peningkatan interaksi dengan komunitas di sekitar dan aktor-aktor luar perlu dikelola dengan bijaksana untuk mencegah konflik yang tidak diinginkan. (Hajar et al., 2022).

3.2.3. Integritas dan Etika dalam Pengambilan Keputusan

Meskipun integritas dalam pengambilan keputusan tinggi, perlu diakui bahwa tantangan etika dapat memberikan dampak signifikan. Inisiatif seperti pengembangan kode etik atau pelatihan etika dapat membantu menangani masalah ini secara proaktif. Desa Tulang memiliki fondasi kuat pada nilai-nilai integritas dan etika dalam pengambilan keputusan. Ini mencakup ketaatan terhadap norma-norma moral, kejujuran, dan kewajaran sebagai panduan dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil. (Sawir & Sos, 2021).

Penerapan integritas tercermin dalam transparansi dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi terkait kebijakan dan program desa diumumkan secara terbuka kepada masyarakat untuk memastikan adanya akuntabilitas. Integritas di Desa Tulang ditandai dengan pertanggungjawaban tinggi pada masyarakat. Kepala desa dan perangkat desa memahami pentingnya memastikan bahwa setiap keputusan dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada warga. Pengelolaan keuangan desa di Desa Tulang mencerminkan komitmen pada etika. Penggunaan dana desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat diawasi secara ketat untuk mencegah penyelewengan dan korupsi. Integritas pemerintahan di desa ini mencakup perlindungan hak-hak masyarakat. Keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memastikan keadilan dan keberlanjutan bagi semua warga.

Integritas di Desa Tulang diwujudkan dalam pemberdayaan perempuan dan masyarakat adat. Keputusan yang menghormati dan memperkuat peran keduanya memperkuat integritas pemerintahan desa. Desa Tulang mungkin telah mengembangkan kode etik atau pedoman perilaku untuk pengambil keputusan. Dokumen ini menjadi

landasan untuk memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada nilai-nilai etika yang telah ditetapkan. (Meutia, 2017)

Integritas juga mencakup penanganan potensi konflik kepentingan di antara pengambil keputusan. Langkah-langkah preventif dan mekanisme pengungkapan dirancang untuk mencegah konflik kepentingan yang dapat merusak integritas. Kesadaran etika ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Pengambil keputusan di desa mungkin mengikuti program pelatihan etika untuk memperkuat pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip moral dalam pengambilan keputusan. Integritas di Desa Tulang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Masyarakat memiliki peran aktif dalam memastikan bahwa integritas dipertahankan melalui kontrol sosial dan partisipasi dalam evaluasi kebijakan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik kepemimpinan, penanganan konflik, dan integritas dalam pengambilan keputusan publik di Desa Tulang, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1). Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat. Praktik kepemimpinan di Desa Tulang menunjukkan kecenderungan ke arah kepemimpinan yang inklusif dan partisipatif. Kepala desa dan perangkat desa telah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui forum-forum musyawarah desa dan pertemuan lainnya. Keterlibatan masyarakat ini memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya kendala dalam koordinasi antar pemangku kepentingan, baik antara pemerintah desa, lembaga desa, maupun kelompok masyarakat, yang berpotensi menghambat efektivitas pengambilan keputusan publik. 2). Tantangan dalam Penanganan Konflik. Desa Tulang menghadapi tantangan dalam penanganan konflik yang bersumber dari perbedaan kepentingan masyarakat, keragaman latar belakang sosial, serta keterbatasan sumber daya desa. Konflik yang muncul belum sepenuhnya dikelola melalui mekanisme yang terstruktur dan partisipatif, sehingga dalam beberapa kasus berpotensi menimbulkan ketegangan berkepanjangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran kepala desa sebagai mediator konflik serta penerapan pendekatan penyelesaian konflik yang lebih sistematis, terbuka, dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. 3). Integritas dan Etika dalam Pengambilan Keputusan. Integritas dan etika telah menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan publik di Desa Tulang, yang tercermin melalui upaya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Pemerintah desa berupaya memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya potensi konflik kepentingan dan tantangan dalam menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan nilai-nilai integritas dan etika aparatur desa perlu terus dilakukan agar pengambilan keputusan publik benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan desa.

Referensi

1. Duryat, D. R. H. M. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan; Teori Dan Praktiknya Di Indonesia. Penerbit K-Media.
2. Dwiyanto, A. (2021). Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
3. Hajar, N. K. D. S., Amrizal, D., Izharasyah, J. R., & Mahardika, A. (2022). Perencanaan Pembangunan & Pembuatan Kebijakan Daerah: Dari Teori Ke Praktik (Vol. 1). umsu press.
4. Irawan, N. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
5. Kardina, M., & Frinaldi, A. (2023). Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, 1(4), 133–142.
6. Meutia, I. F. (2017). Analisis kebijakan publik. Aura (CV. Anugrah Utama Raharja).
7. Muhammad Armia & Munawir. (2025). Komunikasi Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mempercepat Pelayanan Publik dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat. Jurnal An-nasyr.
8. Ramdhan, M. (2021). Metode penelitian. Cipta Media Nusantara.
9. Sagala, H. S., & Sos, S. (2018). Pendekatan & Model Kepemimpinan. Prenada Media.
10. Satria, A., & Mony, A. (2019). Dinamika praktek sasi laut di tengah transformasi ekonomi dan politik lokal. Jurnal Sosiologi Pedesaan, 7(2), 143–152.
11. Sawir, M., & Sos, S. (2021). Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik. Deepublish.
12. Sobari, W. (2019). Problem ideologi hingga kepemimpinan: Urgensi revisi undang-undang pelayanan publik. Jurnal Borneo Administrator, 15(2), 137–158.
13. Sos, J. P. S. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Unisri Press.
14. Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2021). *Desentralisasi dan Pembangunan Desa di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
15. Syahril, S., Darmawati, & Harianti, I. (2025). Integritas Moral dalam Konteks Pengambilan Keputusan di Desa Bontobaru Kabupaten Kepulauan Selayar. Jurnal Ilmiah Administrasi.
16. Tersiana, A. (2018). Metode penelitian. Anak Hebat Indonesia.

17. Yunina, D. S., & Pujiyanto, W. E. (2024). Transformational Leadership di Kantor Pelayanan Desa. *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 58–70.
18. Thoha, M. (2019). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.